

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA
BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004**

AHMAD REZA ANDHIKA

ABSTRACT

Notary is a public official appointed by Government to help the society make present or emerging agreements in the society. The purpose of the making of these written agreements before a Notary is to guarantee the legal certainty of stakeholders of the agreements. The written agreement made before a Notary is called a Deed. The purpose of the Deed is, so that it can be used as powerful evidence in case of disputes among the stakeholders or any lawsuit from other parties. Based on this explanation, how important the function of the deed is obvious, thus, in order to prevent the deed from being invalid, Notary Public Institution is governed in Notary regulations which have been replaced by Law No 30/2004 on The Position of Notary.

Keywords: Notary, Deed, Criminal Case

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang mana hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Profesi Hukum meliputi Polisi, Hakim, Advokat, Jaksa, Notaris dan lain-lain. Profesi Hukum sendiri adalah profesi yang luas, dimana setiap peran memiliki karakter sendiri-sendiri. Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa notaris. Peranan notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik.¹

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang

¹www.hukumonline. Etika Profesi Hukum di Era Perubahan, Imam Nasima Mahasiswa pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam *Indonesian Law Society Utrecht*. Yang di akses terakhir 29 Januari 2015.

melakukan perjanjian. Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut Akta. Tujuannya adalah, supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Berdasarkan uraian diatas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak adanya suatu akta, maka lembaga Notaris diatur didalam Peraturan Jabatan Notaris (PJM) yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku, ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan matabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga matabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.³ Menurut GHS Lumban Tobing dalam bukunya peraturan jabatan notaris lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind Compagnie* (VOC).⁴ Sejak kehadiran VOC tersebut di Indonesia lalu lintas hukum perdagangan dilakukan dengan akta notariil, hal ini berdasarkan Notodisoerjo menyatakan bahwa “Lembaga Notariat telah di kenal di negara Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata.”⁵

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari. Dengan demikian dapat di pahami bahwa keberadaan jabatan notaris sebagai notaris sangat penting dan di butuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.⁶ Berkaitan dengan itu bahwa ruang lingkup kewenangan notaris adalah

²G.H.S. Lumban Tobing, “Peraturan Jabatan Notaris”, Erlangga, Jakarta. 1992. Hal 15.

³Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981 hal. 14

⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 3

⁵R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan)*, Jakarta, PT. Grafindo, 1993, hal 13

⁶G.H.S Lumban Tobing, *Perturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, Jakarta, Erlangga hal. 51-52.

dalam bidang hukum perdata dalam rangka menciptakan kepastian hukum melalui alat bukti akta otentik. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat meliputi, bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sedangkan bukti tertulis di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa akta otentik dan akta di bawah tangan.⁷ Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸ Sebagai alat bukti Pasal 1867 KUH perdata “ pembuktian dengan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.” Pasal 1868 KUH perdata “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang di tentukan undang-undang yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu di buat.”

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris di tuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari oleh lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut :⁹

- a) Kejujuran, kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu, terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara Cuma-Cuma. Dan bersikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan.
- b) Autentik. Artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, autentik pribadi profesional hukum antara yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan dan tidak semata-mata menunggu perintah atasan, dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan.
- c) Bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma.
- d) Kemandirian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikutipandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

⁷Pasal 1866 KUH perdata

⁸Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal 29.

⁹Supriadi, Op.cit, hal. 19-20.

- e) Keberanian moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian dimaksud disini yaitu, menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli, menolak tawaran damai ditempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Disinilah kadar sepiritual seseorang di ukur, tidak hanya dengan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa saja.¹⁰ Seseorang harus dapat menjalani hidup dengan konsisten sesuai pemahaman misi hidup manusia sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Demikian juga dalam menjalankan profesi notaris, telah di atur dalam kode etik sebagai parameter kasat mata, detail dan jelas tentang larangan boleh dan tidak terhadap perilaku dan perbuatan notaris. Kode etik dipahami sebagai norma dan peraturan mengenai etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dari suatu profesi yang dinyatakan oleh organisasi profesi, yang fungsinya sebagai pengingat berperilaku bagi para anggota organisasi profesi tersebut. Kode etik hanya sebagai “pagar pengingat” mana yang boleh dan tidak boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan. Organisasi profesi notaris yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) telah membentuk kode etik profesi yaitu kode etik INI. Kode Etik INI bagi para notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral administratif.¹¹ Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang jabatan notaris, dan kode etik notaris yang merupakan keseluruhan kaedah moral yang di tentukan oleh perkumpulan ikatan notaris indonesia yang wajib di taati oleh semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, baik dalam pelaksanaan tugas jabatan maupun dalam perilaku kehidupan sehari-hari, namun tekanan faktor eksternal dari lingkungan serta pertahanan diri yang lemah merupakan sebab betapa sebagian oknum notaris dewasa ini mudah terjerumus ke praktek kenotariatan tidak ideal yang mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai pejabat umum.¹²

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 68 UUN notaris diawasi oleh majelis pengawas yaitu:

- a. Majelis pengawas daerah untuk tingkat kabupaten atau kota.
- b. Majelis pengawas wilayah untuk tingkat propinsi.
- c. Majelis pengawas pusat untuk tingkat pusat di jakarta.

Mengenai pengawasan terhadap notaris adalah meliputi keseharian/perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, yaitu terhadap akta-aktanya. Pengawasan ini semula dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung. Namun sejak dikeluarkannya undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang di dalamnya mengatur kewenangan pengawasan terhadap notaris, maka sejak saat itu kewenangan pengawasan beralih yang semula di lakukan oleh pengadilan negeri

¹⁰Anke Dwi Saputro, Op.Cit, hal. 98.

¹¹*Ibid*, hal.99.

¹²*Ibid*, hal 100.

yang secara struktur berada di bawah mahkamah agung, kini beralih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berkaitan dengan kasus pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris sehingga notaris harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap akta otentik yang dibuatnya berdasarkan kenyataan tersebut, maka penelitian tesis ini akan di fokuskan pada tanggung jawab notaris terhadap akta yang di buat dan berindikasi perbuatan pidana berdasarkan bukti awal dan patut di duga adanya keterlibatan notaris dalam melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan akte otentik yang dibuat, yang tersusun dalam suatu judul tesis : Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta jika terjadi masalah pada akta tersebut di tinjau dari Undang- Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang jabatan notaris ?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi perkara pidana?
3. Bagaimanakah upaya dan peranan majelis kehormatan beserta organisasi agar meminimalisir profesi notaris dalam pembuatan akta tidak telibat dalam kasus pidana?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta jika terjadi masalah pada akta tersebut di tinjau dari Undang- Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang jabatan notaris ?
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi perkara pidana?
3. Untuk mengetahui upaya dan peranan majelis kehormatan beserta organisasi agar meminimalisir profesi notaris dalam pembuatan akta tidak terlibat dalam kasus pidana?

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum (bersifat memberi petunjuk atau ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹³

1. Sifat penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya menggambarkan secara sistematis factual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum atas Undang-Undang Jabatan notaris. Sedangkan analitis maksudnya hasil data penelitian diolah, dianalisa dan selanjutnya diuraikan secara cermat terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris yang terhadap akta yang berindikasi pelanggaran hukum menurut ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data-data sekunder atau disebut juga dengan metode kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris atau hal lain berhubungan topik permasalahan dalam penelitian ini (yang berkaitan dengan sinkronisasi hukum).¹⁴

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi Peraturan Perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sementara bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku, literatur, undang-undang, tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris serta hasil wawancara yang telah diolah dengan Informan seperti beberapa Notaris (sebagai anggota Perkumpulan/Ikatan Notaris Indonesia), Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunderyaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta, 2005, hal. 35

¹⁴Ibid

¹⁵H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009. hal. 47.

¹⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 11

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

4. Analisis Data

Didalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁸ Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik.¹⁹ Setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan selanjutnya metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.²⁰

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik. adapun kata otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Dalam UUJN, Tugas dan Fungsi Notaris sebagai berikut:

- a. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (waarmerking)
- b. Membuat *fotocopy* dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- c. Melakukan pengesahan kecocokan *fotocopy* dengan surat aslinya (legalisir)

¹⁷ibid

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984. hal. 251.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 106.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 23.

- d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- e. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- f. Membuat akta risalah lelang
- g. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut diberikan kepada para pihak sesuai dengan Pasal 51 UUJN.

B. Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Suatu surat dapat dikatakan sebagai akta otentik adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa akta Notaris bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta itu sendiri menurut A.Pitlo mengartikannya sebagai surat-surat yang di tandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²¹ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang di beri tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²²

Pelanggaran terhadap pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris akan mengakibatkan sebuah akta otentik akan mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, suatu akta yang mempunyai kekuatan dibawah tangan sebagaimana telah dijelaskan diatas nilai pembuktiannya tidak sama dengan akta otentik, dalam akta dibawah tangan pembuktiannya hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan akta otentik yang juga mempunyai kekuatan pembuktian luar.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka apabila terjadi sengketa dimana salah satu pihak mengajukan akta dibawah tangan misalnya, surat perjanjian jual-beli atau sewa menyewa yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi. Akan tetapi jika tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap akta otentik. Barang siapa menyangkal tanda tangannya pada suatu akta otentik, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu dengan kata lain, pejabat umum atau Notaris yang membuat akta tersebut telah melakukan pemalsuan surat.²³

²¹ H.R. Daeng Naja, *Teknik pembuatan akta(Buku wajib kenotariatan)*, pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

²² *Ibid.*

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 590-591

C. Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum yang membuat Akta Jika Terjadi Masalah Pada Akta Tersebut di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :²⁴

Akta Notaris berisi keterangan dan pernyataan para pihak, dibuat diatas kehendak atau permintaan para pihak, dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang. Notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah Undang-Undang, selanjutnya membatalkan akta notaris berarti secara lahiriah tidak mengakui akta tersebut, dengan demikian akta tersebut bukan akta notaris. Penilaian akta Notaris secara lahiriah bukan akta Notaris, maka harus dibuktikan dari awal sampai akhir akta, bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi mengenai bentuk suatu akta Notaris. Jika dapat dibuktikan bahwa akta Notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta Notaris, maka akta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan, yang penilaian pembuktiannya tergantung kepada pengakuan para pihak dan hakim.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata notaris hanya bertanggung jawab kepala akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Secara pidana sendiri Notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila dikemudian hari aparat yang berwenang seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa Notaris secara sadar meyakinkan telah memasukkan keterangan-keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

D. Karakteristik Suatu Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Menurut Sudikno Merokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan,

²⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003 hal 93.

²⁵ Ibid hal 75

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan arena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.²⁶

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan-tulisan dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu akta dan tulisan-tulisan lainnya, yang dipentingkan dari suatu akta adalah penandatangannya, karena dengan menandatangani suatu akta seseorang dianggap menanggung terhadap kebenaran apa-apa yang ditulis dalam akta itu. Di antara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang istimewa yaitu yang dinamakan sebagai akta otentik. Sebelum melengkapi uraian tentang masalah pembuktian dengan akta otentik tersebut, terlebih dahulu akan diterangkan mengenai arti membuktikan. Yang dimaksud dengan membuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan tergugat.²⁷

E. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), antara lain:²⁸

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1981), hal. 149

²⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, hal.5

²⁸ R Sunarto Soerodibroto, *Ibid*

e) Keterangan terdakwa

Notaris sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat dan perannya yang penting dalam lalu lintas hukum, sudah selayaknya Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik dan dugaan unsur pidana harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam gugatan untuk menyatakan akta notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formil dan materil akta notaris. Penilaian akta notaris harus dilakukan dengan asas “praduga sah” yang dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan kepengadilan umum. Dalam kaitan dengan Penetapan Notaris sebagai tersangka, berkaitan dengan pelaksanaan "Profesi", maka Majelis Pengawas Daerah wajib untuk menolak memberikan persetujuan, sampai dibuktikan lebih dahulu adanya ke salahan Notaris melalui putusan Majelis Pengawas Notaris yang bersifat final dan mengikat. Kebenaran akta Notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum, sehingga akta yang dibuat Notaris adalah bersifat kebenaran formal, disebut begitu karena Notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta Notaris bukan kebenaran materil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di pengadilan.²⁹

F. Akibat Hukum Bagi Akta Notaris Jika Terjadi Perkara Pidana

Pelaksanaan tugas Jabatan notaris yaitu dalam lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tataran hukum perdata. Karena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap, Notaris tidak akan membuat suatu apapun. notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan/ pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 15 ayat (2) huruf e. UUJN. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan

²⁹ *Ibid.*

atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak amanat dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.³⁰

Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :

- a) Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak
- b) pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :
 - a. Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana

menurut pasal ini adalah “Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut.³¹ Dalam hal ini notaris melakukan tindakan melanggar undang-undang jabatannya bersama pihak lain demi kepentingan tertentu.
 - b. Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan.

menurut pasal ini seseorang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, untuk membantu orang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.³² Seperti jika notaris x bersama para pihak menghadap ke kantornya ingin meminta pengesahan fotocopy KTP tetapi si notaris mengetahui bahwasannya KTP tersebut tidak sesuai dengan yang asli, dengan kepentingan tertentu notaris melakukan pengesahan tersebut, tanpa melihat yang aslinya.

³⁰ Habib Adjie, *Op. Cit*, hal.24.

³¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bandung, PT. Karya Nusantara 1989 hal 72

³² Ibid

- c. Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu.
Bahwa dalam pasal ini dikatakan barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.³³ Notaris disini dalam pembuatan akta memasukan orang-orang yang tidak berkepentingan ke dalam isi akta yang dibuatnya dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga orang-orang yang berkepentingan dalam akta dirugikan haknya.
- d. Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.
pasal ini menerangkan barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik tentang kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu.³⁴ Notaris disini harus berhati-hati ketika telah melakukan renvoi dalam akta atau perubahan harus ada paraf dari seluruh para pihak yang berkepentingan dalam akta jika tidak maka ini dikatakan memberikan keterangan palsu.
- e. Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan.
Yaitu barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, karena penggelapan.³⁵
Disini notaris dalam menjalankan jabatannya telah telah menerima honorarium atas jasa hukum berdasarkan kewenangannya dari para pihak tetapi notaris tidak menerbitkan akta yang di buatnya dalam waktu yang cukup lama, karena telah menggunakan honorarium itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain, sehingga para pihak yang menggunakan jasa hukumnya dirugikan.
- f. Pasal 378 KUHP yaitu penipuan
Menurut pasal ini barangsiapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.³⁶ Disini notaris dalam menjalankan jabatannya mengeluarkan akta yang yang diluar kewenangannya, seperti notaris yang belum di angkat menjadi PPAT menerbitkan Akta PPAT dengan membuat stempel palsu dan SK palsu sehingga akta yang diterbitkan tidak bisa digunakan, sehingga merugikan orang yang berkepentingan.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

- g. Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat.

Bahwa yang bersangkutan menurut pasal ini menukar, menjual tanah yang sedang diberikan hak tanggungan dan tidak memberikan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.³⁷ Notaris/PPAT disini dengan kepentingan tertentu menerbitkan akta jual beli kepada orang lain atas tanah yang telah diberikan hak tanggungan sementara belum di terbitkan roya atas tanah tersebut belum dikeluarkan, sehingga merugikan orang yang memiliki hak dalam tanah tersebut.

- c) Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya perbuatan pidana), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik, karena Kepolisian wajib menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena fungsi penyidik Kepolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana. Terhadap kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya penyidikan di Kepolisian.
- d) Merupakan kewajiban setiap warga/anggota masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa³⁸
- “barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:
- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
 - 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Dan jika notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam

³⁷ *Ibid*

³⁸ R.Sunarto soerodibroto KUHP, dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal 136

pasal pada KUHP maka notaris dapat dipidana atau dihukum.

G. Pengertian Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya perlu untuk mendapat pengawasan supaya notaris tidak berbuat sewenang-wenang berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Perbuatan notaris yang tidak bertanggungjawab dapat merugikan kepentingan masyarakat sedangkan tugas notaris adalah melayani kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana notaris berada dalam naungannya dan ada juga organisasi profesi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berfungsi untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Sebelum berlakunya undang-undang Jabatan Notaris yang baru, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap para Notaris adalah lembaga pengadilan, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang- Undang Jabatan Notaris, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 maka terjadi perubahan terhadap pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris di seluruh Indonesia, yaitu dengan membentuk Majelis Pengawas, yang terbagi menjadi tiga yaitu :

- a.. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Serta Majelis Pengawas Pusat.

H. Kepastian Hukum Tentang Perlindungan Notaris

Asas kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum.³⁹ Perlindungan menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti hal (perbuatan) melindungi, sedangkan yang dimaksud hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan demikian maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang

³⁹ Mertokusumo, sudikno *Ibid*

menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang-Undang, dalam Undang-Undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang jabatan Notaris telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kemudian MPD melaksanakan rapat pleno dan hasil rapat tersebut dapat dijadikan penyidik sebagai dasar melakukan pemanggilan. Untuk menindak Notaris nakal seharusnya Undang-Undang Jabatan Notaris memuat ketentuan pidana khusus bagi Notaris jika melanggar jabatan. Baik itu pidananya berupa denda, kurungan atau penjara sebab Notaris bertugas membuat akta. Dengan akta itu, Notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Kalau hak orang hilang, otomatis masyarakat akan dirugikan karena itu perilaku Notaris perlu diawasi. Sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUDN majelis pengawas berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa sebagaimana Majelis Pengawas Notaris merupakan organ penegak hukum yang satu-satunya berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan Notaris. Peranan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Notaris sebagai suatu profesi dari campur tangan pihak manapun termasuk pengadilan dalam menentukan kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, tidak jarang notaris berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dilihat sekilas, hal ini akan bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, dimana notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan yang oleh Undang-undang yang diberikan Hak ingkar⁴⁰. Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUDN mewajibkan notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban

⁴⁰ www.hukum Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*

umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPdata.

Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesuliatan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 UUJN yang menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Hak Ingkar Notaris merupakan Hak atau kewajiban Menurut symposium hak ingkar Notaris diselenggarakan oleh Komisariat Ikatan Notaris Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, Hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak namun merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi.⁴¹

Setelah notaris mengajukan permohonan untuk menggunakan hak ingkarnya dihadapan majelis hakim yang akan memeriksa perkara baik secara lisan atau tertulis, maka Pasal 170 KUHP, hakim yang akan menimbang sah tidaknya alasan permintaan tersebut.

I. Upaya Dan Peranan Majelis Kehormatan Beserta Organisasi Agar Meminimalisir Profesi Notaris Dalam Pembuatan Akta Tidak Terlibat Dalam Kasus Pidana

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang majelis untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris.
3. Perilaku para notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangnya juga memeriksa fisik minuta akta Notaris (Bab IV Tugas Tim Pemeriksa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 39-PW.07.10.Tahun 2004). Tujuan dari pengawasan terhadap notaris agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan

⁴¹ A.Kohar, *Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, tulisan dalam Notaris Berkomunikasi*, (Penerbit Alumni, Bandung, 1984), hlm. 157.

masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 pada pasal 66 diuraikan tentang wewenang MPD dalam hal pemanggilan Notaris telah dicabut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2013, kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, dimana dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 terdapat wewenang dalam pemanggilan Notaris yang digantikan oleh Majelis Kehormatan yang sebelumnya majelis pengawas daerah, walaupun undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasal 66 telah diambil alih oleh majelis kehormatan tetapi mempunyai tugas dan wewenang yang sama.

I V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang telah dibuatnya dan di tandatangani oleh para pihak tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian, dimana isi akta yang dibuat notaris merupakan kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta tersebut sehingga notaris hanya sebagai penengah dan memberi masukan hukum kepada para pihak tentang kehendak yang dimasukan kedalam akta tersebut. Apabila akta notaris tersangkut masalah pidana notaris hanya dipanggil sebagai saksi, dan mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan ditingkat kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan. Mengingat bahwa akta otentik tersebut yang dibuat oleh notaris akan dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan di pengadilan.
2. Akibat hukum bagi akta Notaris jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk dipidana hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut, walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil.
3. Upaya yang dilakukan oleh majelis Kehormatan dan organisasi Notaris dalam meminimalisir akta yang terlibat dalam kasus pidana dimana dengan melakukan pengawasan secara rutin terhadap notaris pada daerah-daerah kerjanya dengan dibantu oleh majelis pengawas daerah, selain memberikan pengawasan terhadap notaris upaya yang dilakukan yakni dengan memberikan penyuluhan yang berupa seminar-seminar

notaris yang berguna bagi notaris dalam menuntun mereka dalam pembuatan akta otentik agar tidak tersangkut masalah pidana.

B. SARAN

1. Disarankan sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris seharusnya tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya. Notaris hendaknya benar-benar paham atas tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan Undang-Undang kepadanya, oleh karena itu kualitas pelayanan dalam praktek kenotariatan hendaknya
2. Disarankan meskipun undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dalam hal pemeriksaan perkara khususnya perkara pidana, hendaknya notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya dengan memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil, sehingga aktanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dengan demikian Notaris terhindar dari perbuatan pidana.
3. Disarankan kepada Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas beserta organisasi hendaknya disamping sebagai pengawas terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris, juga mempunyai fungsi perlindungan khususnya berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan posisi notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara.

V. Daftar Pustaka

Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris), Bandung, Refika Aditama, 2008

A.Kohar, *Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, tulisan dalam Notaris Berekomunikasi*, (Penerbit Alumni, Bandung, 1984),

Andasasmita, Komar, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981.

H.R. Daeng Naja, *Teknik pembuatan akta (Buku wajib kenotariatan)*, pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Friedman, Lawrence. M., *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*, American Law : An Introduction, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001

Kie, Tan Thong, *Studi Notariat- Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Kadir, Muhammad Abdul, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2011.

Lubis, M. Solly, Ilmu Filsafat dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994.

Marpaung, Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Mamudji, Soejono Soekanto & Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1985.

Muhammad, Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke III 2006).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana).